

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK

MIKAEL MAHIN

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: mahinmikael@gmail.com

Universitas Kapuas Sintang, Jln. Y.C.Oevang Oeray No.92 Sintang, Kalimantan Barat

Abstrak: Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 mengacu angka partisipasi Politik tahun 2018 mencapai 78.49 persen. Pada tahun 2007 angka partisipasi 80.07 persen, Tahun 2012 angka partisipasi 78.85 persen. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi membutuhkan proses persiapan yang panjang, masih ada beberapa kendala dan rintangan antara lain masyarakat yang belum perekaman *E-KTP*, rumitnya Pemilu pindah memilih, masih maraknya isu politik identitas yang memilih karena ikatan budaya, suku, agama, dan kepentingan tertentu. Faktor pendukung partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 wilayah Kabupaten Sintang. Pendidikan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak bahwa masyarakat memilih Kabupaten Sintang ikut dalam proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi. Kesadaran politik dikaitkan kepada indikator memahami pentingnya Pemilihan Kepala Daerah. Proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat Kabupaten Sintang berpartisipasi dalam sistem politiknya.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Masyarakat Kabupaten Sintang.

Pemilihan umum hakikatnya merupakan proses sekaligus saran demokratis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemilu merupakan proses sirkulasi elit yang bersifat inklusif di mana semua warga secara terbuka memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Melalui prosesi pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan beragam harapan, keinginan, dan berbagai kepentingannya melalui pilihan-pilihan politiknya yang disalurkan dalam pemilu. Dalam tataran idealitas normatif, bahkan, melalui mekanisme pemilu inilah masyarakat menentukan pilihan haluan kehidupan bernegara secara paripurna. Karena itulah dalam konteks pemilu, masyarakat sebagai pemilih memiliki urgensi tersendiri. Karena itu pula, dalam konteks pemilu, perilaku pemilih menjadi salah satu elemen penting untuk dikaji. Kajian atas perilaku pemilih bukan saja dimanfaatkan untuk mendulang suara, namun terutama untuk melihat dan memahami konstelasi harapan dan kepentingan dalam konteks politik demokratik.

Pemilihan umum yang baik dan bersih mensyaratkan adanya pemilih yang mempunyai pengetahuan, kesadaran, bebas dari intimidasi berbagai pihak, dan terhindar dari pengaruh jaminan uang (*money politic*). Dalam rangka ini proses Pemilu perlu ditanggapi secara kritis oleh

masyarakat, khususnya oleh pemilih dalam Pemilu. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu harus melakukan upaya melalui regulasi serta bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pemilih.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik. Salah satu prasyarat berjalannya sistem demokrasi adalah ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang bebas dan berkala. Sesuai dengan definisi dan prasyarat tersebut, maka diselenggarakan pemilu serentak dimana Masyarakat Kabupaten Sintang dapat memilih pemimpin mereka secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya masing-masing.

Partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan

capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103). Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi.

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sintang dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 Mengacu pelaksanaan angka partisipasi bahwa angka mencapai 78.49 persen, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi membutuhkan proses persiapan yang panjang, masih ada beberapa kendala dan rintangan antara lain masyarakat yang belum perekaman *E-KTP*, rumitnya Pemilu pindah memilih, masih maraknya isu politik identitas yang memilih karena ikatan budaya, suku, agama, dan kepentingan tertentu. Berawal dari pra penelitian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sintang dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018.

Berikut ini penulis sampaikan Tren Partisipasi Pemilih Masyarakat Kabupaten Sintang dimulai dari Pemilihan Bupati, Pemilihan Gubernur, legislatif, dan Pemilihan Presiden adalah berikut:

Agenda	Tahun	Persentase	Selisih
PILBUP	2005	81.74 %	
	2010	83.76 %	2.02 %
	2015	75.63 %	- 8.13 %
PILGUB	2007	80.07 %	
	2012	78.85 %	-1.22 %
	2018	78.49 %	-0.36 %
PILEG	2009	81.86 %	
	2014	83.30 %	1.44 %
	2019	86,21 %	2.91 %
PILPRES	2009	83.21 %	
	2019	86,47 %	3.26 %

Sumber: KPU Kabupaten Sintang Tahun 2019

Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut

Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007:151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Menurut Miriam Budiarmo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan

memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Partisipasi dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikut-sertaan. Menurut Adams (2004:83) partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa.

Menurut Miriam Budiarmo (1998:3) Partisipasi Politik merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurangnya diperhatikan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*. Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Karena itu, makin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.

Demikian juga sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada

indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tandang kurang baik. Indikasi yang dapat disebutkan bahwa masyarakat kurang atau bahkan sama sekali tidak berminat untuk masalah-masalah pemilu dan ketatanegaraan lainnya.

Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan yang sukarela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih. Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga.

Faktor-faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (1992:140) menyebutkan dua *variable* penting yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi politik seseorang. *Pertama*, aspek

kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. *Kedua*, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan *variable independen*). Artinya bahwa kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 2006:144-145).

Sementara itu menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (1989:168) memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu: *Pertama*, berkenaan dengan

penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. *Kedua*, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik. *Ketiga*, yaitu menyangkut sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik. *Keempat*, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku Politik dan Partisipasi Politik.

Partisipasi pemilih pemula dalam Pilgub langsung memang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya.

Tipologi Partisipasi Politik

A. Rahman H.I (2007:288) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Menurut Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007:152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni:

1. Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

2. Partisipasi politik spector orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengkritik Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.
 - a. Pengajuan petisi
 - b. Berdemonstrasi
 - c. Konfrontasi
 - d. Mogok
 - e. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda: pengrusakan, pemboman, pembakaran
 - f. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

Pemberian suara dalam Pilgub merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikand dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas' oed (2011:57-58) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu Partisipasi Politik Konvensional dan Partisipasi Politik Non Konvensional. Adapun rincian bentuk Partisipasi Politik Konvensional dan Non Konvensional.

1. Partisipasi Politik Konvensional
 - a. Pemberian suara atau voting
 - b. Diskusi politik
 - c. Kegiatan kampanye
 - d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif
2. Partisipasi Politik Nonkonvensional

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (2007:33) metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal. Menurut Arikunto (2002:116) menyatakan subjek penelitian atau sasaran penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dikalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sintang dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

Nomor	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
1	Ambalau	9.087	6.462	71,1 %
2	Binjai Hulu	9.307	6.445	69,2 %
3	Dedai	21.159	17.201	81,3 %
4	Kayan Hilir	20.342	19.131	94,0 %
5	Kayan Hulu	17.331	14.272	82,3 %
6	Kelam Permai	12.421	9.966	80,2 %
7	Ketungau Hilir	15.161	13.034	86,0 %
8	Ketungau Hulu	14.803	11.057	74,7 %
9	Ketungau Tengah	19.921	16.629	83,5 %
10	Sepauk	35.880	27.805	77,5 %
11	Serawai	16.835	12.483	74,1 %
12	Sintang	43.728	34.982	80,0 %
13	Sungai Tebelian	22.829	16.593	72,7 %
14	Tempunak	20.344	16.879	83,0 %

Sumber: KPU Kabupaten Sintang Tahun 2018

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 wilayah Kabupaten Sintang dapat diketahui berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Sintang dapat diperoleh suara sah sebanyak 218.492, suara tidak sah sebanyak 4.537, dengan total suara sebanyak 223.110 suara dengan jumlah TPS sebanyak 1.083.

Capaian Partisipasi Politik masyarakat pada akhirnya telah terjawab dengan adanya keberhasilan jalannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPUD. Berdasarkan penghitungan KPUD terlihat dari 282.422 daftar pemilih yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah 218.492 Pemilih. Perolehan tersebut terbagi pada ketiga pasangan calon dengan komposisi perolehan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Total
1	Drs. Milton Crosby, M.Si dan H. Boyman Harun, S.H	40.735
2	Dr. Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot, M.Pd	98.166
3	H. Sutarmidji, S.H., M.Hum dan Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H	79.591
Total Suara Sah		218.492

Sumber: KPU Kabupaten Sintang Tahun 2019

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 wilayah Kabupaten Sintang unggul pasangan dr. Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot, M.Pd dengan perolehan suara 98.166, disusul oleh H. Sutarmidji, S.H., M.Hum dan Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H perolehan suara 79.591 sedangkan suara paling rendah pasangan Drs. Milton Crosby, M.Si dan H. Boyman Harun, S.H dengan perolehan suara 40.735. Partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 wilayah Kabupaten Sintang merupakan pencapaian partisipasi politik yang menurun yaitu 78.49 % jika dibandingkan pada Pilgub tahun 2012 sebesar 78.85 % atau menurun 0.36 %. Banyak pihak mengakui bahwa masyarakat Sintang cukup aktif dalam menggunakan hak pilihnya. Baik Partai politik, KPUD, masyarakat umum, LSM, sampai kalangan perguruan tinggi mengakui bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat cukup tinggi. Namun demikian, beberapa pihak menilai bahwa pencapaian angka 78.49% itu tidak bisa menjadi ukuran partisipasi politik masyarakat. Sedangkan

jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) itu sendiri tidak sesuai dengan jumlah *real* yang ada di masyarakat. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) memang menjadi masalah yang selalu hadir dalam pemilihan umum.

Faktor Pendukung Partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 wilayah Kabupaten Sintang.

1. Pendidikan.

Pendidikan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak adalah merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat pemilih Kabupaten Sintang. Pendidikan politik adalah pengetahuan politik, yakni membawa seseorang ke dalam tingkat partisipasi politik tertentu. Dalam hal ini, partisipasi politik tertentu dimaksudkan setiap warga negara memiliki kemampuan melek politik yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan mereka bagaimana memandang sistem politik itu. Pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasinya dalam menyalurkan tuntutan dan dukungannya.

2. Kesadaran Politik.

Kesadaran Politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan setiap warga negara akan urgensi kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran dikaitkan kepada indikator pemahaman yang mana disini kita bisa kategorikan dalam memahami pentingnya Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal ini pemahaman pemilih dilihat dari hal tersebut dianggap penting karena dapat dikategorikan dalam hal hubungannya dengan pemilihannya nanti dapat memberi efek ataupun sebuah dampak yang diharapkan bisa berhasil dalam konteks memajukan daerah itu sendiri. Suara yang diberikan oleh pemilih dapat membantu memberikan dampak yang cukup pada perolehan akhir perhitungan suara. Oleh karena itu, para pemilih harus perlu memahami pentingnya mereka dalam ikut berpartisipasi didalam pemilihan umum tersebut.

Pemilih Kabupaten Sintang banyak yang mempunyai keinginan untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 yang

diselenggarakan dalam rangka membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Kenyataan ini menyebabkan mereka untuk ikut serta dalam pemilihan umum, khususnya pemungutan suara. Kesadaran inilah yang membuat mereka ikut serta dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak.

3. Sosialisasi Politik.

Proses yang disediakan kepada masyarakat untuk belajar dan membentuk orientasi politik. Proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 wilayah Kabupaten Sintang, adapun Agen-agen sosialisasi antara lain *Pertama*, Keluarga merupakan agen sosialisasi politik pertama bagi semua individu. *Kedua*, Sekolah Bersama dengan keluarga, lembaga pendidikan formal ikut menjadi agen sosialisasi politik bagi seorang warga Negara, *Ketiga*, Peer Groups merujuk kepada kelompok dimana seorang individu menjadi anggotanya. Peer groups meliputi teman bergaul, teman sekolah, teman bekerja, atau teman dilingkungan keagamaan. *Keempat*, Pekerjaan merupakan agen sosialisasi politik karena sebuah pekerjaan cenderung membentuk bahkan menuntun pandangan pekerjanya tentang politik dan pemerintahan. *Kelima*, Media massa merupakan agen sosialisasi politik terpenting. Pandangan masyarakat tentang politik dan pemerintahan amat tergantung dari media yang dikonsumsi. *Keenam*, Partai Politik dan Kelompok Kepentingan Sebagai organisasi yang memiliki ideologi dan nilai-nilai politik, maka partai politik berperan penting membentuk nilai-nilai politik dari anggotanya. *Ketujuh*, Kontak Politik Langsung Peristiwa politik yang melibatkan masyarakat dengan politisi, partai politik atau pemerintah akan membentuk pandangan masyarakat tentang politik dan pemerintahan.

Kesimpulan dan Saran

Partisipasi politik merupakan bagian yang paling penting dalam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2018. Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan yang suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih. Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sintang dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 Mengacu angka partisipasi tahun 2018 mencapai 78.49 persen. Pada tahun 2007 angka partisipasi 80.07 Persen, Tahun 2012 angka partisipasi 78.85 persen. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi membutuhkan proses persiapan yang panjang, masih ada beberapa kendala dan rintangan antara lain masyarakat yang belum perekaman *E-KTP*, rumitnya pemilu pindah memilih, masih maraknya isu politik identitas yang memilih karena ikatan budaya, suku, agama, dan kepentingan tertentu.

Faktor Pendukung Partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 wilayah Kabupaten Sintang. Pendidikan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak bahwa masyarakat pemilih kabupaten Sintang ikut dalam proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat pemilih Kabupaten Sintang. Kesadaran politik dikaitkan kepada indikator pemahaman yang mana disini kita bisa kategorikan dalam memahami pentingnya Pemilihan Kepala Daerah. Proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat Kabupaten Sintang berpartisipasi dalam sistem politiknya.

Disarankan Pemilih Kabupaten Sintang hendaknya pro aktif dengan cara membuka diri dan secara terus menerus meningkat partisipasi Politik di masa akan datang. Perlu peningkatan pendidikan politik melalui keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta peran para tokoh masyarakat secara dini untuk meningkatkan kualitas pemilih. *Ketiga*, Menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan memilih. Pemberian edukasi politik yang ditunjukkan secara khusus untuk pemilih pemula sehingga dapat merangsang keinginan pemilih untuk berpartisipasi Politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A , Rahman, H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press
- Mas' oed, Mohtar. McAndrews, Colin (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari. H. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Pontianak: Gadjah Mada University Press.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. (2002). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta